

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

## DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI



## TAHUN ANGGARAN 2021

## KATA PENGANTAR

Ungkapan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 dapat tersusun. Sebagai salah satu unit koordinasi yang berada di lingkup Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berkewajiban menyusun Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 13, Bab IV dalam Peraturan MENPAN-RB No.29 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bertujuan untuk :

- a. Sarana bagi Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban kinerja;
- b. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal penguatan politik luar negeri Indonesia di dunia Internasional.

Suksesnya program kegiatan yang telah terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur keberhasilan untuk kegiatan di masa yang akan datang, namun demikian hambatan dan kendala selama Tahun 2021 ini akan menjadi bahan evaluasi pada perbaikan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Semoga

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2021

Deputy Bidang Koordinasi  
Politik Luar Negeri,



RINA P. SOEMARNO

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>4</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
• DASAR HUKUM.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
• TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
• STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
• ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
• PERMASALAHAN UTAMA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
• SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. RENCANA STRATEGIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Visi, Misi dan Tujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Strategis Kebijakan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. PERJANJIAN KINERJA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Efisiensi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Realisasi Anggaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Amerika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral dan Sekretaris Deputi.

Politik Luar Negeri merupakan arah kebijakan atau strategi suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara dalam lingkup dunia internasional. Untuk menciptakan hubungan internasional tersebut diperlukan sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas diplomasi dan kerjasama luar negeri Indonesia serta terselenggaranya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja.

Capaian Kinerja Tahun 2021 dapat terlihat dalam Tabel Capaian sebagaimana berikut :

Tabel 1 :  
Tabel Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi Tahun 2021	% Realisasi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	87%	111,97%	128,70%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	87%	100%	114,94%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	84%	85,71%	102,04%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	BB	BB (79,84)	100%
	b. Nilai PMPRB	29	30	103,44%
	c. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	4	4	100
	d. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy	75	95,5	127,33%



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

## **✚ DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam.

## **✚ TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, tugas Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;



5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN;
9. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Multilateral;
10. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Politik Luar Negeri;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidkooor Pollugri;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputy Bidkooor Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kementerian Kominfo;
6. Kementerian PAN & RB;
7. Kejaksaan Agung;
8. Badan Intelijen Negara
9. Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepolisian Negara RI;
11. Instansi lain yang dianggap perlu.

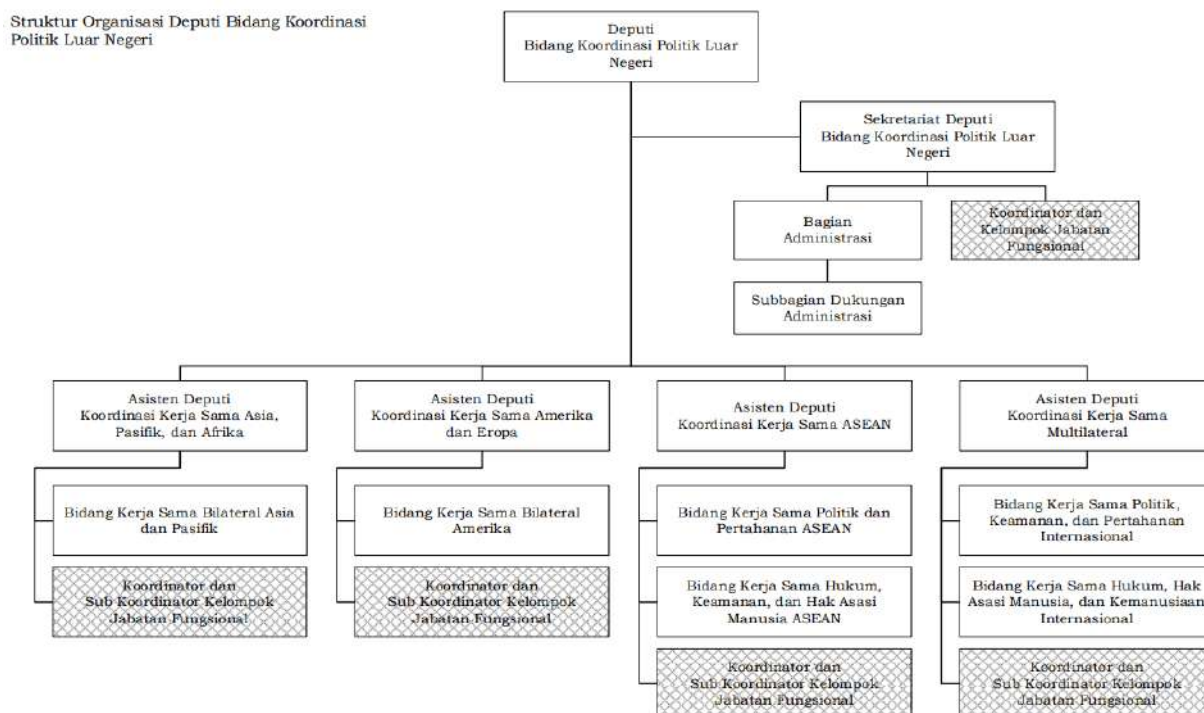
## **STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI**

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 5 (lima) orang Pejabat Eselon II yang terdiri dari:
  - a. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
  - b. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
  - c. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama ASEAN;
  - d. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Multilateral;
  - e. Sekretaris Deputy
2. Asisten Deputy dibantu oleh Kepala Bidang Kerjasama Politik dan Pertahanan ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, Keamanan dan HAM ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Kepala Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Kepala Bidang Kerjasama Amerika, Kepala Bidang Kerjasama Eropa, Kepala Bidang Kerjasama Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, HAM dan Kemanusiaan Internasional serta para analis kebijakan.
3. Sekretariat Deputy, terdiri dari Sekretaris Deputy setingkat Eselon II dibantu oleh Perencana Ahli Madya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Perencana Ahli Muda, Analis Anggaran Muda, Arsiparis Muda, Kepala Sub Bagian Umum, Arsiparis Pertama, Pengadministrasi Umum, Pengelola Program dan Kegiatan, Pengevaluasi Program dan Kinerja dan Staf Tata Usaha.

Gambar 1 :

**STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDKOOR POLLUGRI**



**ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

#### **PERMASALAHAN UTAMA**

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan.

Mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans-nasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Isu permasalahan utama yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkoba ke Indonesia; (4) *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan unilateral.

Prioritas kebijakan bidang kerjasama pembangunan internasional saat ini adalah mendukung kerja sama pembangunan internasional

dalam peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, beberapa isu yang dihadapi antara lain:

- Penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian.
- Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan mekanisme dan pengelolaan pendanaan satu pintu agar kerjasama pembangunan internasional dapat dilaksanakan secara integratif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional
- Dari sisi pendanaan, perlunya pemanfaatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor melalui
- Pada Aspek Sosial-budaya, Citra positif Indonesia sangat penting dalam pergaulan Internasional, sehingga Indonesia perlu melakukan diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional.

Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, yaitu negara demokrasi, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi progresif, keanekaragaman budaya, dan diaspora Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik mengingat ada banyak aktor yang terlibat. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi kebijakan luar negeri terdapat target program prioritas, yaitu memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri.

Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233 organisasi/forum internasional, seperti ASEAN, G20, dan PBB. Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum internasional dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan

internasional. Pada tingkat domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait agar Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau komitmen di tingkat internasional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan Kepala Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.

## ✚ SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputusan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri TA. 2021 sebesar Rp **5.144.983.000,-** Anggaran untuk dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 :  
Anggaran Kedeputusan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	1.777.225.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.579.455.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama ASEAN	1.718.619.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Multilateral	1.129.195.000
EAC	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.030.109.000
<b>Total Anggaran Kedeputusan Bid. Koord. Politik Luar Negeri 2021</b>		<b>5.144.983.000</b>

### 2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh:

1. Sekretariat Deputy;
  - 1.1. Bagian Administrasi
  - 1.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
  - 2.1. Bidang Kerjasama Bilateral Asia dan Pasifik;
  - 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
  - 3.1. Bidang Kerjasama Bilateral Amerika
  - 3.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama ASEAN
  - 4.1. Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN;
  - 4.2. Bidang Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia ASEAN;
  - 4.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Multilateral
  - 5.1. Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;
  - 5.2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional.
  - 5.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6.1. Fungsional Tertentu;
  - 6.2. Fungsional Umum.

## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Deputy Bidkooor Pollugri 2021-2024 mencakup visi, misi, program dan Indikator Kinerja. Rencana strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

##### 1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidkooor Pollugri menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Deputy Bidkooor Pollugri adalah

***Meningkatkan Kapasitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Dalam Rangka Mendukung Tujuan Nasional di bidang Politik Luar Negeri***



Guna mewujudkan visi tersebut, Sekretaris Deputy Bidkooor Pollugri menetapkan **Misi** yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;**
- b. Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.**

**Tujuan** yang ingin dicapai Deputy Bidkooor Pollugri dalam pembangunan bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2018 adalah

- a) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;
- b) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- c) Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

## **2. Strategis Kebijakan**

Dalam rangka mencapai tujuan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tersebut maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu

Tabel 3:  
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama  
Deputi BidKoor Pollugri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	e. Nilai SAKIP
	f. Nilai PMPRB
	g. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
	h. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

## B. PERJANJIAN KINERJA

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4:  
Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
Tahun 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	87%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	87%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	87%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP	BB
	e. Nilai PMPRB	29
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	4
	g. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy	75

Tabel 5:  
Penjelasan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
Tahun 2021

Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
1) Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri; K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2021 : 87 2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional; K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2021 : 3,83 3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2021 : 11
2) Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	Perhatian besar pada dokumen perencanaan nasional mencakup isu-isu : 1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI; 2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional; 3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral; 4) Terorisme; 5) Transnational Crime;

Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
	6) Perdagangan manusia; 7) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, 8) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan 9) Keamanan siber.
3) Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedepatian Bidang Koordinator Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
4) Nilai SAKIP	Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam atas pelaksanaan Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kedepatian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
5) Nilai PMPRB	Penilaian Mandiri Inspektorat Kemenko Polhukam bersama Kedepatian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri atas pelaksanaan Sistem Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
6) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	Penilaian atas pelayanan Kesekretariatan Lingkungan Kedepatian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
7) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy	Penilaian Biro Perencanaan dan Organisasi atas pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran di Lingkungan Kedepatian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Perjanjian Kinerja Kedepatian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 tersebut diimplementasikan melalui program peningkatan koordinasi bidang Pollugri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan dan sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan bidang Pollugri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:

1. Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
2. Koordinasi kerjasama Amerika Eropa
3. Koordinasi kerjasama ASEAN
4. Koordinasi kerjasama Multilateral
5. Layanan Kesekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri



Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mendukung kegiatan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp 5.144.983.000,- (*Lima Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah* ).

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 per tanggal 31 Desember 2021 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6:  
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	87%	111,97%	128,70%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	87%	100%	114%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	84%	58,33%	85,71%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP	BB	BB (79,84)	100%
	e. Nilai PMPRB	29	30	103,44%
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	4	4	100
	g. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy	75	95,5	127,33%

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021

Pencapaian dari sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

### ➤ **Sasaran Strategis : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif**

#### **1. Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.**

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, adapun target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam dibawah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kedeputian Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, yaitu:

- a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri;
- b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;
- c) Jumlah Forum Internasional

Tabel 7:

Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2021

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Capaian 2021</b>	<b>% Capaian 2021</b>
a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri	87	92,61	106,44%
b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,83	3,98	103,38%
c) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral	46	58	126,09%
<b>Rata - rata Realisasi 2021 =</b>			111,97 %
<b>Target Capaian 2021 =</b>			87% %
<b>Persentase Capaian 2021 =</b>			<b>128,70%</b>

**a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri;**

Sejak awal 2020, hampir seluruh negara di dunia menghadapi wabah infeksi virus corona baru yang membuat pemerintah masing-masing sibuk berupaya mencegah penularan lebih lanjut demi keselamatan warga negara. Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) sejak awal selalu menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintah.

Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri, “Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI” diperoleh berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Pengukuran capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI melalui 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Sub IKU-1: Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri,
2. Sub IKU-2: Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu
3. Sub IKU-3: Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, dan
4. Sub IKU-4: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Pengukuran Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI dilakukan pada akhir Tahun 2021. Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI namun melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI. Hal tersebut dilakukan melalui Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-4).



Dalam rangka mendukung Kemlu selaku focal point dalam pencapaian peningkatan indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, hingga TA 2021, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait pelayanan, perlindungan dan penanganan WNI dan BHI di luar negeri, yang dalam hal ini berkaitan dengan isu keamanan yang berdampak pula pada keamanan nasional. Rekomendasi secara spesifik memuat langkah-langkah penanganan WNI bermasalah (WNI-b) yang terkait kasus pelanggaran hukum di luar negeri, termasuk keterlibatan dalam terorisme. Koordinasi tersebut antara lain:

1. Koordinasi terkait Penanganan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina; dan
2. Koordinasi terkait Penanganan Warga Negara Indonesia di Afghanistan, Irak dan Turki.

Koordinasi penanganan WNI memuat prinsip operasi dan langkah teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam menangani WNI yang terkait kasus terorisme di Malaysia dan Filipina, serta penanganan WNI di Afghanistan, Irak dan Turki.

Sebagai catatan, penanganan WNI terkait kasus terorisme di luar negeri dilakukan dengan dasar *case by case* mengingat sensitivitas isu dan perbedaan sistem penanganan warga negara asing di setiap negara.

Tabel 8:  
Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI Tahun 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021
<b>Target</b>	82,21	83,68	86	87
<b>Realisasi</b>	98,49	89,91	88,35	92,61
<b>Capaian</b>	119,80%	107,45%	102,73%	106,44%

Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Hal ini dikarenakan terdapat 2 indikator yang melebihi 100%, yaitu Sub IKU-4 Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri dan Sub IKU-4: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Tabel Capaian Sub Iku pada Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri Tahun 2021

Sub Iku	Capaian 2021
1) Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri	122,01%
2) Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu	67,53%
3) Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	97,41%
4) Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	123,06%

Tahun 2021 terdapat berbagai perubahan akibat pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan perubahan pada berbagai bentuk dan jadwal kegiatan, serta berbagai tantangan pra Covid-19 yang masih ada dan di luar kendali pemerintah. Pandemi memicu peningkatan masalah dan kasus yang dialami oleh WNI yang berada di luar negeri juga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan pelayanan dan perlindungan WNI harus dibatalkan, dijadwalkan ulang, atau diubah formatnya Tahun 2021. Perubahan ini sangat mempengaruhi hasil dan efektivitas berbagai kegiatan. Lebih lanjut, tantangan dari tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi juga masih ada, yaitu:

- 1) banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti: kebijakan pemerintah setempat, termasuk kebijakan protokol kesehatan (lockdown, terbatasnya jam

- pelayanan kantor pemerintahan dsb) yang menghambat proses penyelesaian kasus,
- 2) ketersediaan moda transportasi repatriasi,
  - 3) keberadaan alat bukti, saksi, dan sistem hukum negara asing, dan
  - 4) proses koordinasi di dalam negeri untuk penanganan kasus juga kerap dihadapkan pada kendala keterbatasan kapasitas yang ada pada kementerian/lembaga/instansi dalam tindak lanjut penanganan kasus di dalam negeri.

Pandemi Covid-19 yang masih menjangkiti akan terus mempengaruhi WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri serta cara WNI bepergian ke luar negeri. Kontraksi ekonomi dan sosial akan terus berlangsung paling tidak hingga 1 tahun ke depan. Dapat diprediksikan WNI akan terus mengalami berbagai masalah ketenagakerjaan, keimigrasian maupun masalah lainnya akibat dari kontraksi ekonomi dan sosial tersebut. Apabila kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dan upaya menghadapi tantangan penyelesaian kasus dapat terus dilaksanakan, target peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI pada tahun 2021 akan dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan strategi penyeimbang selain penanganan kasus yang tepat dan berpihak, yaitu upaya prevensi dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari masalah di luar negeri, penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan perlindungan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan perlindungan dan penguatan diplomasi perlindungan.

#### **b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;**

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*.

Realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2021 adalah 3,98 dari skala 5. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2021 pada Indeks Citra Indonesia adalah sebesar 3,83.

Sebagai upaya mempermudah responden dan meningkatkan partisipasi survei dilakukan penyesuaian pengukuran Indeks Citra pada tahun 2021, yang sebelumnya berdasarkan 6 dimensi (*Governance, Export, Tourism, Investment and Immigration, dan Culture and Heritage*) menjadi 3 Dimensi, yaitu :

1. *Tourism and Socio Culture*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi Indonesia baik untuk wisata alam, menonton atraksi atau program pariwisata maupun untuk melihat budaya warisan maupun kontemporer Indonesia
2. *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang “*Competency dan Fairness*” termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia ;
3. *Economy* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan Indonesia serta pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia;

Penghitungan target “Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional” diukur melalui survei yang dilakukan oleh 129 (seratus dua puluh sembilan) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyoal masyarakat asing non-WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta *counterpart* terkait lainnya.

Perbandingan Jumlah Responden Dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2018 – 2020

Responden Survei	2018	2019	2020	2021
Jumlah responden yang terverifikasi (orang)	12.624	12.896	10.277	10.356
Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi (perwakilan)	104	121	110	129

Jumlah orang yang menjadi responden survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional dan jumlah perwakilan RI di luar negeri yang berpartisipasi pada survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan tersebut dikarenakan penyebaran survei yang tidak hanya dilakukan secara luring tetapi juga secara daring sehingga dapat memperluas koresponden pada perwakilan di luar negeri.

Indeks Citra di Mata Dunia merupakan target nasional yang arah kegiatannya berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat arah kegiatan pada tahun 2021 yang dilaksanakan pemerintah dalam mencapai target Indeks Citra di Mata Dunia ialah sebagai berikut:

Cascading RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021 pada Indikator Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional

Prioritas Nasional 7	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
Arah Kebijakan	Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Sasaran	Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Indikator	Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Strategi	1. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik Indonesia 2. Peningkatan Peran-Serta Aktor Non Pemerintah dalam Diplomasi Publik yang Inklusi

Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia berkontribusi dalam peningkatan dimensi *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang “Competency dan Fairness” termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui :

- a) Menko Polhukam berpartisipasi secara virtual sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan the 14<sup>th</sup> United Nation Congress Of Crime Prevention dan Criminal Justice, di Kyoto pada



ret 2021.

Beberapa pokok intervensi Indonesia antara lain :

- 1) mengajak negara-negara anggota PBB untuk memperkuat kerja sama Internasional Pencegahan dan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan lintas negara sebagai upaya pencapaian SGD 2030 khususnya tujuan nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
  - 2) Mengingatkan agar negara-negara PBB memberi perhatian serius atas kejahatan perikanan (IUU Fishing) yang terkait dengan kejahatan lintas negara lainnya;
  - 3) Mengusulkan pembentukan suatu norma dan standar internasional dalam memenuhi tujuan SDG 16 butir 2 mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak, terutama bagi anak yang terdampak teroris dan kelompok ekstrem, dengan fokus pada upaya pencegahan, rehabilitasi serta tetap menjunjung hak-hak anak.
- b) Menko Polhukam menjadi tuan rumah pada pertemuan Forum Kerja Sama Bilateral Bidang Keamanan RI-Rusia ke-6 di Jakarta tanggal 14 Desember 2021. Pada pertemuan tersebut Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menko Polhukam dan Pemerintah Federasi Rusia, diwakili oleh Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, sepakat meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan terorisme termasuk dalam penanganan *foreign terrorist fighters*.



Gambar 3.  
Forum Kerja Sama Bilateral Bidang Keamanan RI-Rusia, Jakarta, 14 Desember 2021



Gambar 4.  
Penandatanganan  
MOU International  
Information Security  
antara RI dan Rusia  
Pada Forum Kerja  
Sama Bilateral  
Bidang Keamanan  
RI-Rusia, Jakarta,  
14 Desember 2021



Pada akhir pertemuan dilakukan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah RI dan Federasi Rusia mengenai Kerja Sama di Bidang Keamanan Informasi Internasional (*Agreement on Cooperation in The Field of International Information Security*) oleh Menko Polhukan dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia. Kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong kerja sama dalam pencegahan, pengawasan dan respon bersama terhadap ancaman keamanan informasi. Delegasi Rusia menyampaikan konsep Rencana Implementasi Area Kerja Sama Utama dalam Bidang Keamanan Internasional (2022-2025) untuk dapat dipertimbangkan Pemerintah RI.

- c) 23 Desember 2021, Kemenko Polhukam RI dan Departemen Dalam Negeri Australia menyelenggarakan Pertemuan ke-8 Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM RI-Australia) di Jakarta. Pertemuan dipimpin bersama oleh Menko Polhukan dan Menteri Dalam Negeri Australia, Yang Mulia Karen Andrews dengan didampingi oleh delegasi kedua negara yang terdiri dari perwakilan K/L terkait. Pertemuan ke-9 MCM RI-Australia menghasilkan Pernyataan Bersama (*Joint Communique*) yang akan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dari masing-masing negara. Pernyataan tersebut antara lain terkait peningkatan kerja sama dalam hal keamanan kawasan; penanggulangan terorisme, termasuk penanganan FTF; pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan; kerja sama



keamanan maritim, termasuk illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing; serta keamanan siber.



- d) Terorisme merupakan isu lintas negara yang membutuhkan komitmen seluruh negara di dunia dalam penanggulangan dan pencegahannya. Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia, salah satunya dengan menekan angka kasus terorisme, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. RAN PE mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- e) Penanganan pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina; Menko Polhukam meminta kepada K/L terkait agar pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina

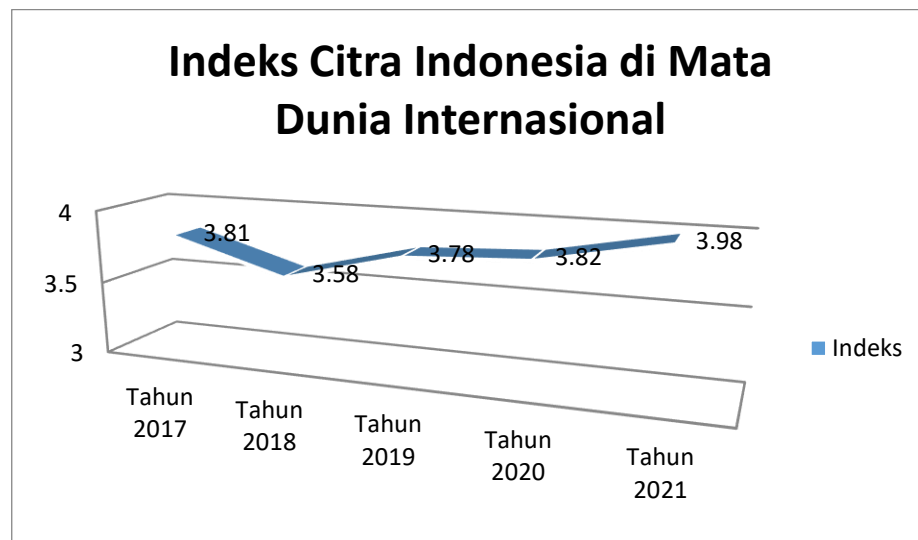
dapat dilakukan secara low profile dan tetap mengedepankan soft diplomacy dengan negara Malaysia dan Filipina.

- f) Perumusan Standard Operational Prosedure (SOP) United State Peace Corps (USPC). Dalam rangka memberikan kontribusi positif terhadap hubungan bilateral RI-AS diperlukan SOP USPC. SOP USPC memastikan agar program kerjasama USPC ini tidak disalahgunakan pihak tertentu di AS untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan atau mengancam keamanan nasional, dan sebaliknya guna memberikan perlindungan bagi para relawan USPC selama bertugas di Indonesia.
- g) Pungusulan Revisi Perpres 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kemenko Polhukam mengajukan revisi terutama dalam hal memperjelaskan status kedaruratan dan jangka waktu kedaruratan penanganan pengungsi dari luar negeri; penegasan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, hubungan pembagian beban dan tanggung jawab dengan Multilateral; dan hal-hal lain yang dapat mempertajam dan membantu semakin baiknya penanganan pengungsi dari luar negeri.
- h) Kemenko Polhukam melakukan penyusunan dan peresmian Standard Operation Procedure (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program U.S. Peace Corps (USPC) di Indonesia. SOP ini tidak hanya mengatur keamanan penyelenggaraan program pertukaran pengajar asing tetapi juga melindungi keberadaan para pengajar asing tersebut di Indonesia.
- i) Menko Polhukam memberikan saran dalam rangka mengatasi ancaman sanksi Undang-Undang CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) dalam hal rencana Pembelian Alutsista dengan Rusia.
- j) Menko Polhukam mendorong revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Rekomendasi tersebut lahir dari adanya salah penafsiran lahirnya

Perpres 125/2016 yang seolah menjadikan Indonesia sebagai aktor utama dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Menko Polhukam menegaskan perlu adanya kejelasan status kedaruratan dan jangka waktu masa darurat penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

- k) Menko Polhukam mendorong percepatan proses ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara umum meningkat dari tahun 2017 sampai 2021. Peningkatan terjadi dikarenakan proses survei yang semakin luas sebagai hasil penggunaan teknologi informasi serta karena peran yang maksimal seluruh pihak, baik pemerintah maupun aktor non pemerintah, dalam meningkatkan seluruh dimensi opini dan ketertarikan publik internasional akan Indonesia. Adapun fluktuasi dari nilai Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia adalah sebagai berikut:



Grafik Perbandingan Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2017 sampai 2021

Dari tahun 2017 sampai 2020 Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara garis besar mengalami peningkatan, kecuali tahun 2018 dikarenakan adanya perubahan metode sistem

penghitungan. Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan sesuai tabel berikut ini:

Tabel III. 1 Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Target</b>	4,00	4,00	4,00	3,80	3,83
<b>Realisasi</b>	3,81	3,58	3,78	3,82	3,98
<b>Capaian</b>	95,25%	95,00%	94,50%	100,53%	152,43%

Dari tahun 2017 sampai 2020 Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara garis besar mengalami peningkatan dan berada dalam kategori Baik.

Secara umum, dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- a. Belum adanya *grand design* terkait penguatan citra Indonesia dalam hal politik, hukum dan keamanan di luar negeri, seperti image seperti apa yang akan ditampilkan Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- b. Koordinasi antar K/L masih belum terlalu kuat dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta kondisi negara yang berbeda-beda dalam hal mewujudkan program dan strategi untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional;
- d. Masih belum maksimalnya pemanfaatan media massa asing dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri;
- e. Khusus Tahun 2021, adanya pandemic Covid-19 membuat beberapa penyelenggaran kegiatan Kemenko Polhukam yang bersifat internasional yang telah direncanakan harus dibatalkan.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penyusunan *grand design* terkait penguatan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- b. Meningkatkan koordinasi antar K/L dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan situasi Pandemi yang membatasi pertemuan, dan juga inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan agar pertemuan tetap berjalan antara lain dengan melakukan pertemuan virtual.

**c) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral**

Kepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suatu jabatan strategis pada Multilateral dimana Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk ikut serta menyusun kebijakan Multilateral, menyusun dan melaksanakan program-program kerja Multilateral yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Penghitungan capaian Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral meliputi peran Indonesia dalam memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral,

misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bureau, dan keberhasilan pencalonan Indonesia pada Multilateral.

Tabel IV. 2 Perbandingan Capaian Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral Tahun 2020 – 2021

	2020	2021
<b>Target</b>	10	3,83
<b>Realisasi</b>	3,82	3,98
<b>Capaian</b>	100,53%	152,43%

Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai pimpinan (baik Host, Co-Host, Chair, Co-Chair maupun dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Multilateral) Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara lain berupa:

- 1.
2. Berpartisipasi secara virtual sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan the 14<sup>th</sup> United Nation Congress Of Crime Prevention dan Criminal Justice, di Kyoto pada tanggal 7 Maret 2021.



3. Menjadi Ketua Delegasi RI dan sebagai Wakil Indonesia pada APSC Council secara virtual pada pertemuan the 24<sup>th</sup> ASEAN Political-Security Community (APSC) Council dalam rangkaian Pertemuan ASEAN Ministers Meeting (AMM) Ke-55 pada tanggal 4 Oktober 2021.





4. Menjadi Delegasi Indonesia pada Pertemuan 23<sup>rd</sup> ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting dalam rangkaian Pertemuan ASEAN Ministers Meeting ke-54 ASEAN yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 2 Agustus 2021.



5. Menjadi Delegasi Indonesia pada Pertemuan 23<sup>rd</sup> ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting dalam rangkaian Pertemuan ASEAN Ministers Meeting ke-54 ASEAN yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 2 Agustus 2021.



6. Berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rangka mendorong pembentukan kepanitiaan Nasional Keketuaan Indonesia di ASEAN Pada Tahun 2023 serta Persiapan Substansi dan Deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
7. Berkoordinasi Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memperkuat koordinasi antar K/L serta posisi Indonesia pada proses perundingan ASEAN Extradition Treaty (EAT).
8. Berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, selaku Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) melakukan kajian menyeluruh terkait keperluan revisi Perpres Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian, termasuk koordinasi dengan K/L terkait mengenai mekanisme anggaran pengiriman misi, sesuai dengan aturan keuangan nasional yang berlaku.



**2. Indikator Kinerja 2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional.**

$$= \frac{\text{Rekomendasi Kedeputusan Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kedeputusan Pollugri}}$$

$$= \frac{14}{14}$$

**Capaian = 100%**

2021 rekomendasi kebijakan Bidang Pollugri berjumlah 14 (dua belas) rekomendasi dengan rincian :

- 1) Koordinasi Kerja Sama Asia Pasifik, 4 rekomendasi;
- 2) Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, 4 rekomendasi;
- 3) Koordinasi Kerja Sama ASEAN, 3 rekomendasi; dan
- 4) Koordinasi Kerja Sama Multilateral, 3 rekomendasi.

14 (empat belas) rekomendasi kebijakan bidang Pollugri tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional, yaitu :

- 1) Mendukung dimensi *Government* pada Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, yaitu mengukur pandangan dunia internasional terhadap Pemerintah RI dalam implementasi penerapan politik luar negeri dan dalam menerapkan diplomasi luar negerinya guna peningkatan kerja sama internasional. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:
  - a) Rekomendasi terkait Keberadaan Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia (vide Surat Menko Polhukam nomor B-50/LN00.00/4/2021 tanggal 30 April 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait) Rekomendasi disampaikan

sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kemenko Polhukam membahas tindak lanjut Pemerintah RI atau pelanggaran wilayah laut NKRI oleh kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dilaksanakan pada 31 Maret 2021. Dalam rekomendasi ini dimuat langkah-langkah penanganan kapal asing yang berada di perairan Indonesia, khususnya kategori Kapal Survey/Kapal Research/Kapal Coastguard/Kapal Perang dalam hal penataan mekanisme kerja sama, pengawasan, dan diplomasi. Dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Citra Positif Indonesia di dunia internasional, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran dan citra positif Indonesia dalam kepatuhan dan penerapan hukum internasional United Nations Convention of the Law and the Sea (UNCLOS) 1982 dan kaitannya dengan komitmen Indonesia menjaga kedaulatan NKRI, khususnya terkait kegiatan militer dan kapal asing di wilayah perairan Indonesia.

- b) Rekomendasi terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (vide Surat Menko Polhukam nomor B-79/LN00.00/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait) Rekomendasi disampaikan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kemenko Polhukam membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kegiatan militer asing di ZEEI. Rekomendasi memuat langkah untuk mendorong percepatan penyelesaian penyusunan rancangan Perpres mengenai kegiatan militer asing di ZEEI dengan mengusulkan agar rancangan Perpres dapat menjadi salah satu prioritas Program Legislasi Pertahanan Kementerian Pertahanan tahun 2021. Rekomendasi ini untuk meningkatkan peran dan citra positif Indonesia dalam kaitannya dengan



komitmen Indonesia menjaga kedaulatan NKRI dalam penerapan hukum internasional United Nations Convention of the Law and the Sea (UNCLOS) 1982.

- c) Surat Menko Polhukam Nomor B-175/LN.00.00/11/2021 tanggal 3 November 2021 kepada Menhan RI dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait mengenai Rekomendasi Percepatan Pembangunan Maritime Command Center (MCC) di Tarakan, Indonesia. Rekomendasi berisi dorongan agar Kemhan selaku focal point pada Indomalphi Joint Working Group Meeting on the Trilateral Cooperative Arrangement (JWG on TCA) dapat mempercepat proses pembangunan MCC Tarakan pada TA 2022 agar Indonesia dapat melakukan koordinasi yang lebih efektif dan sempurna dalam menjalankan TCA dimaksud mengingat kedua negara mitra lainnya telah memiliki MCC yang siap untuk digunakan.
- 2) Mendukung dimensi *People* pada Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, yakni mengukur pandangan publik internasional terhadap masyarakat dan Pemerintah RI tentang kompetensi, keterbukaan, toleransi dan kerja sama internasional serta bentuk tanggung jawab Pemerintah RI dalam melindungi keselamatan warga negara asing di Indonesia, Rekomendasi yang disampaikan antara lain:
  - a) Surat Menko Polhukam nomor B-80/LN.00.01/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 kepada (a) Menteri Sekretariat Negara; (b) Menteri Dalam Negeri; (c) Menteri Luar Negeri; (d) Menteri Hukum dan HAM; (e) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (f) Menteri Agama; (g) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; (h) Kepala Kepolisian Republik Indonesia; (i) Kepala Badan Intelijen Negara; (j) Gubernur Provinsi Jawa Barat; (k) Gubernur Provinsi Jawa Timur; dan (l) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Penyampaian Standard Operation Procedure (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang



Keamanan terhadap Program U.S. Peace Corps (USPC) di Indonesia.

- b) Surat Menko Polhukam nomor B-71/LN.00.01/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan kepada (a) Menteri Luar Negeri; (b) Menteri Sekretariat Negara; (c) Menteri Sekretariat Kabinet; dan (d) Kepala Kantor Staf Presiden perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Membahas Ancaman Sanksi Undang-Undang CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) dalam hal Pembelian Alutsista dengan Rusia.
  - c) Surat Menko Polhukam Nomor B-134/LN.00.03/8/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 untuk mendorong revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Rekomendasi tersebut lahir dari adanya salah penafsiran lahirnya Perpres 125/2016 yang seolah menjadikan Indonesia sebagai aktor utama dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Menko Polhukam menegaskan perlu adanya kejelasan status kedaruratan dan jangka waktu masa darurat penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
  - d) Surat Menko Polhukam Nomor B-49/LN.00.03/4/2021 tertanggal 30 April 2021 kepada Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri untuk menjadi K/L Pemrakarsa dalam proses ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Kementerian Hukum dan HAM kiranya dapat menjadi kementerian pemrakarsa dalam proses ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa, dan Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian pendamping dalam proses tersebut.
- 3) Mendukung Indeks Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri

Dalam rangka mendukung Kemlu selaku focal point dalam pencapaian peningkatan indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, hingga TA 2021, Deputy Bidang Koordinasi

Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam telah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait pelayanan, perlindungan dan penanganan WNI dan BHI di luar negeri, yang dalam hal ini berkaitan dengan isu keamanan yang berdampak pula pada keamanan nasional. Rekomendasi secara spesifik memuat langkah-langkah penanganan WNI bermasalah (WNI-b) yang terkait kasus pelanggaran hukum di luar negeri, termasuk keterlibatan dalam terorisme. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:

- a) Rekomendasi terkait Penanganan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina (vide Surat Plt. Deputy Bidkooor Pollugri nomor R-36/LN.00.00/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait); dan
- b) Rekomendasi terkait Penanganan Warga Negara Indonesia di Afghanistan, Irak dan Turki (vide Surat Menko Polhukam nomor R-13/LN.00.00/4/2021 tanggal 30 April 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait).

Sifat rekomendasi adalah rahasia sehingga hanya gambaran umum yang dapat dilaporkan pada laporan ini. Rekomendasi ini memuat prinsip operasi dan langkah teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam menangani WNI yang terkait kasus terorisme di Malaysia dan Filipina, serta penanganan WNI di Afghanistan, Irak dan Turki.

Sebagai catatan, penanganan WNI terkait kasus terorisme di luar negeri dilakukan dengan dasar case by case mengingat sensitivitas isu dan perbedaan sistem penanganan warga negara asing di setiap negara.

- 4) Mendukung Jumlah Forum Regional dan Multilateral yang dipimpin oleh Indonesia

Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai pimpinan (baik Host, Co-Host, Chair, Co-Chair maupun dalam pencalonan Indonesia

sebagai anggota Multilateral) Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam telah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait pelayanan, yang dalam hal ini berkaitan dengan isu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:

- a) Surat Menko Polhukam nomor B-110/LN.00.03/7/2021 tanggal 27 Juli 2021 kepada Menteri Luar Negeri untuk selaku Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) kiranya dapat melakukan kajian menyeluruh terkait keperluan revisi Perpres Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian, termasuk koordinasi dengan K/L terkait mengenai mekanisme anggaran pengiriman misi, sesuai dengan aturan keuangan nasional yang berlaku.
- b) Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-120/LN01.2/8/2021 pada tanggal 10 Agustus 2021 kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Pada Tahun 2023. Menko Polhukam memberikan 2 (dua) poin dalam rangka Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Pada Tahun 2023, yaitu diperlukan pembentukan kepanitiaan Nasional Keketuaan Indonesia di ASEAN Pada Tahun 2023 serta Persiapan Substansi dan Deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
- c) Surat Menko Polhukam Nomor: B-72/LN00.02/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 mengenai Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Perundingan AET081250, yaitu langkah-langkah kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memperkuat koordinasi antar K/L serta posisi Indonesia pada proses perundingan ASEAN Extradition Treaty (EAT).

- d) Surat Rekomendasi Plt. Deputy II Bidkoor Pollugri Nomor B-2511/LN00.02/9/2021 tanggal 9 September 2021 kepada Kemlu, Kemhan, Mabes Polri dan BSSN mengenai Rekomendasi Kebijakan Penguatan Peran Diplomasi Siber Indonesia di ASEAN dan Koordinasi Isu Siber di Tingkat Nasional. Adapun pokok dalam surat tersebut adalah merekomendasikan agar Kemlu melakukan langkah-langkah diplomasi yang lebih kuat dalam menyelesaikan isu diplomasi siber pada forum ASEAN. Dalam rangka penguatan Koordinasi Isu Keamanan Siber di Tingkat Nasional perlu kiranya kepada Kemhan, Mabes Polri dan BSSN untuk mendorong pengesahan Peraturan Presiden tentang Strategi Keamanan Siber Nasional.

Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pollugri 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) mendukung Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional sebanyak 6 rekomendasi,
- 2) mendukung Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri sebanyak 2 rekomendasi, dan
- 3) mendukung Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral sebanyak 3 rekomendasi.

**a. Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti**

$$= \frac{\text{Rekomendasi Kedeputian Pollugri yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kedeputian Pollugri}}$$

$$= \frac{12}{14}$$

**Capaian = 85,71%**

Rekomendasi kebijakan Bidang Pollugri yang ditindaklanjuti berjumlah 12 (dua belas) rekomendasi dengan rincian :

- 1) Koordinasi Kerja Sama Asia Pasifik, 4 rekomendasi;
- 2) Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, 2 rekomendasi;
- 3) Koordinasi Kerja Sama ASEAN, 3 rekomendasi; dan
- 4) Koordinasi Kerja Sama Multilateral, 3 rekomendasi.

12 (Dua Belas) rekomendasi kebijakan bidang Pollugri tersebut telah ditindaklanjuti, yaitu :

- 1) Rekomendasi terkait Penanganan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina (vide Surat Plt. Deputi Bidkooor Pollugri nomor R-36/LN.00.00/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait). Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu bersama dengan Otoritas Bandara Soekarno Hatta bersama Kementerian/Lembaga terkait lainnya melalui rapat koordinasi tanggal 5 Maret 2021 membahas tindak lanjut teknis terhadap rekomendasi Kemenko Polhukam terkait proses penanganan WNI terkait kasus terorisme di Malaysia. Penanganan WNI dimaksud kembali dilanjutkan dimulai dari Rapat Kemenko Polhukam tanggal 10 September 2021 dan serangkaian rapat teknis lainnya yang dilakukan oleh Dit PWNI- BHI Kemlu.
- 2) Rekomendasi terkait Penanganan Warga Negara Indonesia di Afghanistan, Irak dan Turki (vide Surat Menko Polhukam nomor R-13/LN.00.00/4/2021 tanggal 30 April 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait). Rekomendasi ditindaklanjuti Dit. PWNI-BHI Kemlu melalui pembentukan tim teknis (Surat Ditjen Protkons Kemlu Nomor R/00055/WN/05/2021/66 tanggal 10 Mei 2021 perihal permohonan nama tim teknis). Setelah tim teknis terbentuk, Dit PWNI-BHI telah menyelenggarakan serangkaian rapat teknis secara intens dimulai dengan rapat



pertama tanggal 26 Juli 2021. Namun demikian, aksi tindak lanjut terhenti akibat gejolak internal di Afghanistan yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya opsi yang sudah disepakati. Berdasarkan kesepakatan yang diraih Rapat Kemenko Polhukam tanggal 10 September 2021, Pemri bersikap untuk menunggu hingga situasi di Afghanistan kondusif.

- 3) Surat Menko Polhukam nomor B-50/LN00.00/4/2021 tanggal 30 April 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait berupa Rekomendasi terkait Keberadaan Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga terkait karena terkendala peningkatan kasus COVID-19.
- 4) Surat Menko Polhukam Nomor B-79/LN.00.00/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 kepada Menhan RI dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait mengenai Rekomendasi atas Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Atas dasar Surat Karo Turdang Setjen Kemhan Nomor B/2162/XI/2021 tanggal 2 November 2021, disampaikan informasi bahwa Kemhan telah memprogramkan pembahasan RPerpres mengenai Kegiatan Militer Asing di ZEEI untuk TA 2022. Pembahasan interkementerian terhadap RPerpres dicanangkan untuk selesai tahun 2022 untuk selanjutnya dapat ditingkatkan ke pembahasan panitia antar kementerian (pantarkem) dan harmonisasi.
- 5) Surat Menko Polhukam nomor B-71/LN.00.01/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan kepada (a) Menteri Luar Negeri; (b) Menteri Sekretariat Negara; (c) Menteri Sekretariat Kabinet; dan (d) Kepala Kantor Staf Presiden perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Membahas Ancaman Sanksi Undang-Undang CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) dalam hal Pembelian Alutsista

dengan Rusia. Rekomendasi ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Upaya Indonesia menghadapi Pemberlakuan Sanksi CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) oleh Amerika Serikat” tanggal 29 Juli 2021. FGD tersebut diselenggarakan mendapatkan pengetahuan, masukan, dan pandangan dari kalangan pakar serta *stakeholders*, dalam rangka membahas tantangan dan upaya Pemerintah RI dalam menyusun kebijakan menghadapi pemberlakuan sanksi CAATSA tersebut.

- 6) Surat Menko Polhukam nomor B-80/LN.00.01/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 kepada (a) Menteri Sekretariat Negara; (b) Menteri Dalam Negeri; (c) Menteri Luar Negeri; (d) Menteri Hukum dan HAM; (e) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (f) Menteri Agama; (g) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; (h) Kepala Kepolisian Republik Indonesia; (i) Kepala Badan Intelijen Negara; (j) Gubernur Provinsi Jawa Barat; (k) Gubernur Provinsi Jawa Timur; dan (l) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Penyampaian Standard Operation Procedure (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program U.S. Peace Corps (USPC) di Indonesia, ditindaklanjuti dengan kesepakatan para pihak untuk melakukan sosialisasi SOP tersebut kepada Pemda dan Sekolah-sekolah yang menerima relawan USPC.
- 7) Surat Menko Polhukam Nomor B-49/LN.00.03/4/2021 tertanggal 30 April 2021 kepada Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri untuk menjadi K/L Pemrakarsa dalam proses ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM sebagai K/L pemrakarsa ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa telah melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mendorong proses tersebut. Pada tanggal 1 Juni 2021,

- Ditjen HAM Kemenkumham telah melaksanakan rapat internal bersama Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham untuk membahas prosedur ratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, melalui surat nomor HAM5-HA.04.03-273 tanggal 2 Juli 2021, Kemenkumham bersama K/L terkait telah melaksanakan Rapat Persiapan Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance).
- 8) Surat Menko Polhukam nomor B-110/LN.00.03/7/2021 tanggal 27 Juli 2021 kepada Menteri Luar Negeri selaku Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) kiranya dapat melakukan kajian menyeluruh terkait keperluan revisi Perpres Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. Menindaklanjuti surat yang disampaikan Menko Polhukam kepada Menlu selaku Ketua TKMPP, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan rapat Koordinasi TKMPP pada tanggal 12 Agustus 2021 yang melibatkan seluruh unsur anggota TKMPP untuk membahas sejumlah agenda yang salah satunya adalah membahas rencana revisi Perpre No.86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.
  - 9) Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-120/LN01.2/8/2021 pada tanggal 10 Agustus 2021 kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Pada Tahun 2023. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kemlu melalui kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) antar Kementerian membahas Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 tanggal 17 September 2021 di Bogor, Jawa Barat membahas Persiapan Awal Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.



- 10) Surat Menko Polhukam Nomor: B-72/LN00.02/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 mengenai Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Perundingan AET081250 telah ditindaklanjuti oleh Direktur OPHI Kemkumham tanggal 13 September 2021 melalui rapat konsinyering dalam rangka persiapan pelaksanaan The Second ASEAN Senior Law Officials Meeting Working Group on the ASEAN Extradition Treaty pada 15-17 September 2021 di Tangerang, Banten.
- 11) Surat Menko Polhukam Nomor B-134/LN.00.03/8/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 untuk mendorong revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Rekomendasi tersebut lahir dari adanya salah penafsiran lahirnya Perpres 125/2016 yang seolah menjadikan Indonesia sebagai aktor utama dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Menko Polhukam menegaskan perlu adanya kejelasan status kedaruratan dan jangka waktu masa darurat penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kemlu, Kemenkumham serta Pokja Penanganan Pengungsi dengan melakukan rapat virtual pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pada 27 Desember 2022.
- 12) Surat Menko Polhukam Nomor B-175/LN.00.00/11/2021 tanggal 3 November 2021 kepada Menhan RI dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait mengenai Rekomendasi Percepatan Pembangunan Maritime Command Center (MCC) di Tarakan, Indonesia. Rekomendasi berisi dorongan agar Kemhan selaku focal point pada Indomalphi Joint Working Group Meeting on the Trilateral Cooperative Arrangement (JWG on TCA) dapat mempercepat proses pembangunan MCC Tarakan pada TA 2022 agar Indonesia dapat melakukan koordinasi yang lebih efektif dan sempurna dalam menjalankan TCA dimaksud mengingat kedua negara mitra lainnya telah memiliki MCC yang siap untuk

digunakan. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pengusulan Kemhan untuk memasukkan Pembangunan Maritime Command Center (MCC) di Tarakan, Indonesia ke dalam agenda rencana kerja Tahunan Kemhan Tahun 2022.

➤ **Sasaran Strategis : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal**

**1. Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja

Tabel 14:  
UNSUR-UNSUR PENILAIAN SAKIP

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Berdasarkan Nota Dinas Isnepktur Nomor B-252/PW.03.00/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021, bahwa Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri memperoleh nilai sebesar **79,84** dengan kategori **BB** (sangat baik).

Tabel 15  
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2017 sampai dengan 2021

No	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	20,50	21,88	24,25	25,89	28,30
b.	Pengukuran Kinerja	19,10	20,10	20,10	18,13	18,44
c.	Pelaporan Kinerja	10,63	10,63	10,63	9,80	10,00
d.	Evaluasi Internal	6,69	6,69	6,69	7,88	8,06
e.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	16,21	16,21	13,09	15,42	15,04
<b>Total Nilai =</b>		<b>73,13</b>	<b>75,51</b>	<b>76,08</b>	<b>77,12</b>	<b>79,84</b>
<b>Kategori =</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP pada Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan nilai meningkat pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal. Namun terdapat penurunan pada komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan tahun 2020 mencapai persentase realisasi target rata-rata 100%, namun terdapat 1 (satu) indikator kinerja tahun 2020 yang tidak tercapai yaitu Indeks Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy yang capaian realisasinya hanya 92% (tidak mencapai target). Berdasarkan laporan hasil evaluasi tersebut, kepada Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri direkomendasikan :

1. Mereviu Renstra 2020-2024 secara berkala;
2. Mengimplementasikan kebijakan reward dan punishment yang telah disusun terhadap capaian hasil kerja;
3. Meningkatkan kualitas penyajian laporan kinerja, serta mengevaluasi indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Tahun 2020
4. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas Kinerja pada Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, benchmark, dan konsultasi, serta
5. Meningkatkan konsistensi publikasi dokumen SAKIP dalam rangka keterbukaan informasi publik

## **2. Indikator Kinerja 2 : Nilai PMPRB**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu :





1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penguatan Pengawasan
6. Penatan Sistem Manajemen SDM
7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedepatian Bidkooor Pollugri tahun 2021 dengan nilai **30,49** kegiatan yang dilakukan Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri di antaranya:

#### **1. Manajemen Perubahan**

- Telah menyusun draft pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
- Telah disusun Draft Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021.

#### **2. Penataan dan Penguatan Organisasi**

- Melaksanakan kebijakan eselonisasi atau peralihan pejabat Eselon III dan IV menjadi fungsional.

#### **3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

- Koordinasi terkait revisi Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

#### **4. Penataan Sumber Daya Manusia**

- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021
- Pelaksanaan Diklat dalam rangka pengembangan SDM diklat manajemen keuangan negara melalui Nodin Nomor 153/KP.08.05/3/2021.



- Penerapan aturan disiplin bagi pegawai Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
- Pemberlakuan jadwal WFO dan WFH bagi pegawai Kedeputian Pollugri

#### **5. Penataan Tata Laksana**

- Telah dilaksanakannya *review* SOP Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
- Tersusunnya konsep SOP baru mengenai pendataan dan pemeliharaan Barang Milik Negara

#### **6. Penguatan Pengawasan**

- Pelaporan LHKPN 100%
- LHKASN sampai dengan Triwulan I masih pada tahap pengumpulan data

#### **7. Penguatan Akuntabilitas Kerja**

- Menyusun Perjanjian Kinerja Eselon I s.d. staf periode tahun 2021
- Menyusun IKU 2020-2024
- Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021

#### **8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- Melakukan penyebaran kuisiner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;
- Kedeputian Deputy Bidkooor Pollugri terdapat : SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan media sosial Pollugri yang terus di update maupun media sosial Kedeputian Bidkooor Pollugri dan dapat dilakukan melalui tatap muka/audiensi, serta dilakukan *review* internal terhadap pelayanan

kedeputian; Pelayanan Pengaduan masyarakat/permohonan audiensi dan ditindaklanjuti melalui surat.

Tabel 16  
Rincian Penilaian PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020 dan 2021

No	Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
<b>PENGUNGKIT</b>		<b>36,30</b>	<b>28,64</b>	<b>30,49</b>
<b>I</b>	<b>Pemenuhan</b>	<b>14,60</b>	<b>12,27</b>	<b>12,88</b>
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,22	1,82
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,75	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,67	1,67
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,94	0,88
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,38	1,34
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,31
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,93	1,87
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	1,89	1,99
<b>II.</b>	<b>Reform</b>	<b>21,70</b>	<b>16,37</b>	<b>17,61</b>
1.	Manajemen Perubahan	3,00	1,00	2,75
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,50	1,50
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	2,25	2,25
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,25	1,25
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,58	3,07
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,34	3,34

### Indikator Kinerja 3 : Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Berdasarkan Laporan Bagian Tata Usaha dan Umum Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2021 bahwa Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah 4.

Laporan merupakan hasil survey Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri kepada stakeholder

Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik internal Kemenko Polhukam maupun external Kemenko Polhukam yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Nilai yang diambil adalah nilai yang paling sering muncul (modus) pada hasil perhitungan survei.

Survei dilakukan kepada 100 responden eksternal yaitu para *stake holder* unit Deputy Bidkooor Pollugri dengan hasil 75 responden memberikan penilaian 4 (baik) dan 25 responden lainnya memberikan penilaian 3 (cukup).

Tabel  
Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan  
Keseekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
tahun 2019 sampai dengan 2021.

Komponen	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Indeks Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	4	4	4	4	4	4

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan sepanjang Tahun 2021. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:

a. Aspek Internal;

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh *stake holder* Unit Keseekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan;
- Layanan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

b. Aspek Eksternal.

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri selama Tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membuat identifikasi variable Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretaris Kedeputian Bidkooor Pollugri, menetapkan responden, tempat dan waktu pelaksanaan pengisian survei dan pengumpulan data untuk bahan Survei;
- b) Pengelolaan arsip (Surat keluar dan surat masuk) di Deputi Bidkooor Pollugri;
- c) Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar;
- d) Pengisian Rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai hardcopy dan pengisian pada <http://simpeg.polkam.go.id>;
- e) Membuat validasi data pegawai di lingkungan Deputi Bidkooor Pollugri, Data Inventaris Ruangan dan mengikuti kegiatan Bimtek SAKIP dan PMPRB Unit Kerja.
- f) Penyebaran kuisisioner setiap rapat,
- g) Menerima audiensi dari para stake holder Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,
- h) Pemenuhan sarana dan prasarana ruang kerja

**Indikator Kinerja 5 : Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.**

Dokumen Perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam



melaksanakan tugas dan fungsi serta target kinerja. Adapun dokumen perencanaan yang akan disusun selama tahun 2021 adalah :

- a. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2021;
- b. Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2021;
- c. Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2021;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan bagian evaluasi Kemenko Polhukam secara rutin setiap 3 bulan sekali (per triwulan).

Dalam rangka peningkatan mencapai target, yaitu 4 (empat) dokumen perencanaan Tahun 2021 Sekertaris Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2021 secara bersinergi dan berjenjang dari tingkat Eselon I, yaitu Deputi sampai dengan Eselon IV atau Kepala Sub Bagian;
- b. Menyusun dan mengirimkan Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri sebagai PAGU usulan periode Tahun 2021 ke Kementerian Keuangan RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam.
- c. Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2021;
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I s.d. Eselon IV Triwulan I Tahun 2021 pada Bulan April 2021.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I s.d. Eselon IV Tahunan

Tahun 2021 pada Bulan Januari 2021.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam Nomor 14/PR.01.00/1/2021 pada tanggal 11 Januari 2022 perihal Penyampaian Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2021. Nilai Indeks Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah **95,50**.

Tabel  
Komponen Nilai Indeks Kualitas Perencanaan  
Tahun 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1.	Ketepatan Waktu Dokumen Perencanaan	7,50	7,50	7,00
2.	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	7,25	6,50
3.	Jumlah Revisi	10,00	9,00	10,00
4.	Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Perencanaan Nasional	20,00	10,00	20,00
5.	Respon Perencana Unit Organisasi	5,00	3,51	3,50
6.	Ketepatan Waktu Dokumen Monev	12,50	8,00	11,50
7.	Kualitas Laporan Kinerja	12,50	10,00	12,00
8.	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen Perencanaan	12,50	8,00	12,50
9.	Respon Bagian Monev Unit Organisasi	12,50	10,00	12,50
<b>Nilai Indeks =</b>		<b>100</b>	<b>73,26</b>	<b>95,5</b>

### C. Efisiensi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh 33 orang, yaitu :

- 1 orang Eselon I sebagai Deputi
- 4 orang Esellon II sebagai Asisten Deputi
- 1 orang Esellon II sebagai Sekretaris Deputi

- 8 orang Esellon III sebagai Kepala Bidang
- 2 orang Esellon III sebagai Kepala Bagian
- 4 orang Esellon IV sebagai Kepala Sub Bagian
- 6 orang analis bidang Politik Luar Negeri dan
- 7 orang tenaga administrasi bidang Politik Luar Negeri.

Jumlah sumber daya manusia tersebut belum mencapai kondisi ideal, dimana unit kerja eselon II hanya memiliki 1 atau 2 orang analis. Demikian pada unit kerja Sekretaris Deputy masih terdapat posisi jabatan yang kosong, yaitu perencana dan pengevaluasi program dan kinerja.

Namun dengan keterbatasan sumber daya tersebut Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berusaha mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar tetap mampu memenuhi target kinerja dan target saasaran strategis Triwulan III Tahun 2021.

Pagu awal DIPA Deputy Bidkooor Pollugri Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 10.828.555.000. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, maka dalam upaya penanggulangan bencana tersebut Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah realokasi anggaran dengan merefocusing anggaran K/L. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada awal tahun 2021 semula sebesar Rp 10.373.676.000. Namun seiring berjalannya waktu terdapat refocusing (pemotongan) anggaran sehingga per 31 Desember 2021 anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menjadi Rp 5.144.983.000.

Meskipun Pagu Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pollugri mengalami Refocusing (pemotongan anggaran) sampai 50,40% atau sebesar Rp 5.228.693.000 dari Pagu awal tahun 2021, hal tersebut tidak menurunkan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pollugri. Penyesuaian-penyesuaian sistem kerja dilakukan dalam rangka mematuhi protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 serta demi tercapainya target kinerja tahun 2021.



#### D. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.144.983.000,- (*Lima Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*), Tahun anggaran 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah diserap sebesar Rp 5.139.057.384,- (*Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*). Secara kualitas dana yang terserap untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar 99,88% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 20  
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputy Bidkoo Pollugri Tahun 2021  
Berdasarkan Eselon II atau Rincian Output

Kode	Uraian	Jumlah	Realisasi	%
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	1.376.501.000	1.375.502.785	99,93%
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.091.943.000	1.091.183.354	99,93%
ABC.003	Koordinasi Kerjasama ASEAN	1.162.623.000	1.160.625.030	99,83%
ABC.004	Koordinasi Kerjasama Multilateral	840.349.000	839.546.438	99,90%
EAC	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	673.567.000	672.199.777	99,80%
<b>Total =</b>		<b>5.144.983.000</b>	<b>5.139.057.384</b>	<b>99,80%</b>

Dalam mencapai sasaran strategis kinerja Tahun 2021, Kedeputian Bidkoo Pollugri didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21  
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputy Bidkooor Pollugri Tahun 2021  
Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI TA 2021	% Realisasi
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	4.471.416.000	4.466.857.607	99,90%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	673.567.000	672.199.777	99,80%
<b>TOTAL KEDEPUTIAN II 2021</b>	<b>5.144.983.000</b>	<b>5.139.057.384</b>	<b>99,88%</b>

Pagu awal DIPA Deputy Bidkooor Pollugri Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 10.828.555.000. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, maka dalam upaya penanggulangan bencana tersebut Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah realokasi anggaran dengan merefocusing anggaran K/L. Sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, Kemenko Polhukam mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar Rp 18.364.324.000 dari semula Rp 282.769.824.000 menjadi Rp 264.405.500.000. Berdasarkan Nota Dinas Semenke Polhukam Nomor B-10/PR.01/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Anggaran TA 2021, adapun anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar dari semula Rp 10.373.676.000 menjadi Rp 7.234.603.000. Pada tanggal 12 Juli 2021, sebagai tindak lanjut Refocusing (pemotongan anggaran) Tahap ke-3 pada Kemenko Polhukam dalam rangka penanganan Covid-19, Sesmenke Polhukam mengeluarkan Nota Dinas Nomor 236/PR.01.00/7/2021 perihal refocusing dan revisi anggaran TA 2021. Adapun anggran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar Rp 625.58,332.000 dari semula Rp 7.234.603.000 menjadi Rp 6.608.851.000. Pada tanggal 26 Juli 2021, sebagai tindak lanjut Refocusing (pemotongan anggaran) Tahap

ke-4 pada Kemenko Polhukam dalam rangka penanganan Covid-19, Sesmenko Polhukam mengeluarkan Nota Dinas Nomor 250/PR.01.00/7/2021 perihal refocusing dan revisi anggaran TA 2021. Adapun anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar Rp 1.463.868.000 dari semula Rp 6.608.851.000 menjadi Rp 5.144.983.000.

Berikut perubahan pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri setelah realokasi anggaran Tahun 2021:

Tabel 22  
Perubahan Pagu Anggaran Deputy Bidkooor Pollugri  
Tahun 2021

Kode	Uraian Output	Awal (Rp)	Refocusing Tahap 1 (Rp)	Refocusing Tahap 2 (Rp)	Refocusing Tahap 3 (Rp)
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.548.358.000	1.777.225.000	1.657.225.000	1.376.501.000
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	2.264.776.000	1.579.455.000	1.439.455.000	1.091.943.000
ABC.003	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.464.323.000	1.718.619.000	1.553.619.000	1.162.623.000
ABC.004	Koordinasi Kerjasama Multilateral	1.619.149.000	1.129.195.000	1.044.195.000	840.349.000
EAC.001	Layanan Perencanaan dan Evaluasi -Sekretariat Deputy Bidkooor Pollugri	845.744.000	589.822.000	482.127.000	330.330.000
EAC.001	Layanan Tata Usaha dan Umum-Sekretariat Deputy Bidkooor Pollugri	631.326.000	440.287.000	432.230.000	343.237.000
<b>Total Pagu Anggaran =</b>		<b>10.373.676.000</b>	<b>7.234.603.000</b>	<b>6.608.851.000</b>	<b>5.144.983.000</b>

Perbandingan Data Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23  
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021 Deputy Bidkoor  
Pollugri Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Pagu	6.114.058.000	6.267.327.000	11.850.000.000	8.523.676.00	5.144.983.000
Realisasi	6.091.204.322	6.198.539.473	10.303.009.696	8.188.403.211	5.139.057.384
% Realisasi	99,63%	98,87%	87,95%	96,07%	99,88%





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2021 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2021.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2021 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sekiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2021 yang disusun ini dapat dijadikan sebagai umpan balik guna peningkatan kinerja pada triwulan maupun tahun yang akan datang.



# L A M P I R A N